



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 PENELITIAN TERDAHULU**

Sub bab akan menjelaskan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan membahas relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Penelitian terdahulu bermanfaat karena dapat dijadikan acuan yang kredibel berdasarkan konsep dan data yang sudah diteliti sebelumnya. Selain itu, adanya relevansi terkait demokrasi deliberatif dapat menambah pemahaman peneliti dalam mengerjakan penelitian ini.

Peneliti akan mendeskripsikan secara singkat tiga penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama berupa jurnal yang ditulis oleh Luke Collins dan Brigitte Nerlich (2014). Jurnal ini berjudul *“Examining User Comments for Deliberative Democracy: A Corpus-driven Analysis of the Climate Change Debate Online”* yang dipublikasi oleh Taylor and Francis.

Luke dan Brigitte berpendapat bahwa persepsi publik tentang perubahan iklim memiliki ciri yang heterogen bahkan polarisasi. Berdiskusi secara kritis untuk sebagian masyarakat adalah solusi untuk mengatasi polarisasi yang melibatkan publik dengan isu tersebut. Hal ini memungkinkan terjadinya potensi demokrasi deliberatif baru yang muncul di ruang publik. Jurnal ini membahas aspek pertimbangan yang muncul dalam komentar pengguna internet sebagai tanggapan atas perubahan.

Deliberasi dipahami melalui konsep timbal balik dan penyampaian argumentasi. Dengan menggunakan analisis korpus, Luke dan Brigitte mencari tahu dan memeriksa cara-cara dimana terjadinya perdebatan *online* seputar perubahan iklim yang dapat menciptakan atau menolak terciptanya berbagai suara (tanggapan) dan deliberasi. Dalam jurnal dijelaskan hadirnya pandangan yang bertabrakan dan cukup heterogen dalam ruang publik *online* terutama mengenai sifat perubahan iklim atau pemanasan global yang validitasnya berupa pernyataan ilmiah dan perubahan iklim yang dinilai sebagai ketidakpastian ilmiah. Hal ini menjadi alasan atas meningkatnya panggilan bagi individu untuk terlibat dalam perilaku sehingga dapat mengurangi dampak perubahan iklim antropogenik (Luke & Brigitte, 2014).

Namun, proporsi suara atau pendapat yang dimiliki anggota masyarakat yang terlibat dalam debat *online* berbeda. Dengan menawarkan situs untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi perubahan iklim sebagai masalah yang kompleks terbentuk dan bagaimana mereka berinteraksi dengan persepsi sains, politik, dan masalah ekonomi, misalnya. Tetapi apakah ruang-ruang seperti itu mendorong mediasi dan debat deliberatif? Apakah terlibatnya masyarakat dalam diskusi *online* akan mendorong pembelajaran dan pemahaman baru dengan mendorong keterlibatan publik mengenai isu perubahan iklim?

Selanjutnya, Luke dan Brigitte akan meninjau berbagai klaim tentang debat *online* yang mendorong atau menghambat pertimbangan dan keterlibatan demokratis dengan referensi khusus untuk perubahan iklim. Ini akan diikuti dengan pemeriksaan satu diskusi tertentu, menunjukkan bagaimana analisis

korpus dapat memfasilitasi pemeriksaan fitur musyawarah dengan cara kuantitatif dan kualitatif (Luke & Brigitte, 2014).

Analisis korpus adalah proses sistematis dan otomatis berdasarkan analisis statistik dari frekuensi kata yang memungkinkan peneliti untuk memproses kumpulan data yang lebih besar lebih cepat dan lebih obyektif. Secara konvensional, analisis korpus digunakan untuk memberikan gambaran luas dari data dalam pelaporan kata kunci dan tema kunci dalam kumpulan data. Tahap penelitian selanjutnya akan mengidentifikasi fitur wacana *online* yang dapat menentukan musyawarah dan bagaimana publik dapat diidentifikasi. Hasil menunjukkan bahwa sementara beberapa aspek wacana *online* mencegah sudut pandang alternatif dan menunjukkan "ketidaksopanan", komentar pengguna juga menunjukkan potensi untuk terlibat dalam dialog, dan untuk memungkinkan terjadinya tingkat interaksi masyarakat yang tinggi (Luke & Brigitte, 2014).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian Luke dan Brigitte meneliti dalam forum *online* dan khalayaknya memiliki ruang berupa forum yang terbatas. Dalam penelitian itu menghasilkan aspek wacana online menunjukkan dialog dalam forum *online* lebih menggambarkan komentar yang kurang sopan. Dengan konsep yang sudah dijelaskan oleh peneliti terdahulu, maka peneliti menerapkan analisis yang berbeda dengan yang digunakan oleh Luke dan Brigitte untuk melihat kolom komentar dalam media sosial. Media sosial memiliki peluang bagi penggunanya untuk bersosialisasi dan partisipasi politik secara tidak terbatas ruang dan waktu.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti objek yang akan diteliti berupa teks komentar. Perbedaannya terletak pada

isu yang diangkat. Isu yang diteliti Luke dan Brigitte berkaitan dengan alam yang menuntut perubahan pada masing-masing individu. Sedangkan peneliti memilih isu yang berkaitan dengan pemerintahan, berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang dibuat untuk Calon Legislatif yang akan mengikuti pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Agung memutuskan gugatan atas PKPU Nomor 20 tentang larangan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual anak, dan narkoba untuk mengikuti pemilihan legislatif.

Penelitian kedua berjudul **“Demokrasi Deliberatif dalam Media *Online Detik.com, Kompas.com, dan Vivanews.*”** Penelitian ini dilakukan oleh Ryan Sanjaya, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada 2014. Penelitian yang berawal dari konsep internet dan demokrasi deliberatif ini mengkaji secara ilmiah atas proses demokrasi di media massa. Metode yang digunakan dalam penelitian Ryan adalah analisis isi kuantitatif yang bersifat deskriptif (Ryan, 2014).

Pemilihan ketiga portal berita *online* karena tingkat pengunjung media tersebut cukup tinggi menurut website *Alexa.com* yang diakses pada 12 Juni 2013. Portal berita *Detik.com* berada di peringkat delapan, *Kompas.com* di peringkat 12, dan *Viva.co.id* menduduki peringkat 17. Kasus yang dipilih peneliti adalah konflik Bendera Aceh yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Konflik ini didasarkan oleh keinginan kelompok masyarakat Aceh yang tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mendirikan negara sendiri dan melepaskan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Ryan, 2014).

Tindakan ini dinilai sebagai makar yang telah membahayakan kesatuan negara. Oleh karena itu, pemerintah merespon dengan menjadikan Provinsi Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang kemudian dicabut pada 7 Agustus 1998. Selanjutnya, pada 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia dan GAM melakukan penandatanganan perjanjian damai di Finlandia dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang kemudian diturunkan dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang dalam suatu negara merupakan landasan hukum. Dalam Undang-Undang pasal 246 yang membahas pemerintah Aceh memiliki bendera dan lambang Aceh yang membentuk Qanun yang menyerupai desain yang sama dengan lambing GAM (Ryan, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan isi komentar pembaca pada portal berita *online Detik.com, Kompas.com, dan Viva.co.id* melalui sudut pandang demokrasi deliberatif. Populasi dalam penelitian Ryan sebanyak 260 komentar dari ketiga portal berita *online*. Sebelumnya, terdapat 3.763 komentar dari 123 berita yang kemudian ditentukan dua kriteria untuk diterapkan dalam teknik *probability sampling*. Ryan berpendapat, *stratified random sampling* yang merupakan bagian dari *probability sampling* cocok untuk diterapkan dilihat dari sifat populasi yang homogen dan berjumlah relatif banyak (Ryan, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ryan memiliki hasil yang menunjukkan Detik.com mendapatkan indeks skor deliberasi tertinggi yang disusul Kompas.com. Tingkat deliberasi terendah didapatkan oleh *VIVAnews*. Walaupun demikian, nilai demokrasi deliberatif masih rendah jika dilihat dari

kemampuan berdiskusi secara rasional dan apresiasi yang dilakukan warganet atas pendapat orang lain. Selain itu, pengambilan keputusan yang menjadi tujuan diskusi belum dapat terjadi dalam penelitian dan menjadi keputusan Gubernur Aceh dan DPRA yang sebelumnya sudah mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh (Ryan, 2014).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ryan memaparkan konsep deliberatif dalam portal berita *online*. Kedua media, yaitu media *online* maupun media sosial memiliki karakter yang hampir sama yaitu tidak terbatas ruang dan waktu. Kedua media juga umumnya membutuhkan akun untuk dapat berinteraksi di dalamnya, tetapi media sosial terutama *Youtube.com* lebih sering diakses oleh penggunanya seperti yang disampaikan pada laman *Alexa.com* pada bagian latar belakang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat apakah demokrasi deliberatif yang terbentuk di media sosial sama dengan portal berita *online*.

Terdapat relevansi antara penelitian yang dilakukan Ryan Sanjaya dan peneliti. Keduanya meneliti tingkat deliberasi masyarakat menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Namun, Ryan melakukan penelitian kolom komentar di tiga *website* media berita *online*, sedangkan peneliti meneliti kolom komentar media sosial seorang jurnalis. Selain itu, penelitian Ryan adalah kolom komentar atas berita yang hanya menyajikan teks. Peneliti melihat kolom komentar dari yang menyajikan video atau dilengkapi dengan audio dan visual.

Dalam *website* berita *online*, terdapat *hyperlink* yang menyediakan rekomendasi kepada pembaca untuk melihat topik berita yang masih berkesinambungan. Berbeda dengan video yang peneliti amati kolom komentar

dari berita, berupa video yang sebelumnya ditayangkan di stasiun televisi dan kemudian diunggah ke media sosial jurnalnya. Program ini berupa *talkshow* yang membahas isu hangat yang berkaitan dengan pemerintahan dan isu sosial lainnya, yaitu Program Mata Najwa.

Selanjutnya, penelitian dalam jurnal karya Ardi Winata L. Tobing dari Universitas Sumatera Utara. Jurnal yang diterbitkan pada 2017 ini berjudul **“Demokrasi Deliberatif Dalam Ruang Publik *Cyber Space*”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses praktik demokrasi deliberatif dalam sebuah grup “Diskusi Pluralis Lembaga Bhinneka”. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung terwujudnya proses deliberasi dalam diskusi antar-anggota grup (Ardi, 2017).

Ardi menggunakan beberapa konsep dan teori dalam penelitian ini, seperti konsep Demokrasi Deliberatif, konsep Ruang Publik, dan Teori Tindakan Komunikatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menganalisis sejumlah 222 komentar dalam tiga bulan. Sebanyak 41 komentar pada bulan Juli, 86 komentar di bulan September, dan 95 komentar di bulan November (Ardi, 2017).

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota grup yang aktif memberikan komentar pada setiap status yang bertema UU Pemilukada, UU MD3, serta konflik antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Dalam teori tindakan komunikatif terdapat tiga klaim yang kemudian digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Tiga klaim ini mencakup adanya klaim kebenaran, klaim ketepatan, dan klaim kejujuran (Ardi, 2017).



Melihat penelitian yang telah dilakukan oleh Ardi, peneliti semakin memahami konsep dari demokrasi deliberatif dalam media *online*. Ardi meneliti sebuah forum di media *online* dengan menggunakan teori tindakan komunikatif sebagai unit analisisnya. Penelitian Ardi mencari klaim yang dikembangkan dari teori tindakan komunikatif dan konsep deliberasi. Sedangkan dalam penelitian ini konsep yang digunakan adalah konsep deliberatif yang dikembangkan dari *Key Features* yang dipaparkan oleh John Gastil.

Ardi menuliskan, hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah demokrasi deliberatif yang berada di dalam komentar belum ideal atau masih rendah. Selain itu, adanya ketidakseimbangan dalam diskusi publik karena tendensi dukungan yang hanya ditujukan kepada salah satu pihak, yaitu Presiden Joko Widodo dan Koalisi Merah Putih (Ardi, 2017).

Terdapat relevansi antara penelitian Ardi dengan penelitian ini, seperti unsur demokrasi deliberatif yang muncul dalam suatu ruang publik, dan penelitian dilakukan berdasarkan kolom komentar. Namun, perbedaannya pada penelitian yang sedang dilakukan yaitu meneliti kolom komentar dalam video *talkshow* Mata Najwa episode Siapa Mau Pilih Koruptor. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terdapat acuan untuk berargumen dan menjadi langkah untuk mengedukasi khalayak dengan memberikan tayangan terkait isu yang diangkat.

## **2.2 TEORI DAN KONSEP**

Penelitian atau riset memiliki peran penting dalam praktik komunikasi. Proses komunikasi bertujuan agar tercipta komunikasi yang efektif. Proses penelitian

harus dilakukan secara hati-hati, sistematis dalam mencari fakta dan memiliki prinsip yang cermat guna mendapatkan keputusan yang tepat (Kriyantono, 2014, p. 2). Oleh karena itu, dibutuhkan teori dan konsep untuk terciptanya penelitian yang sistematis.

Riset komunikasi memiliki beberapa elemen dasar, seperti teori dan konsep. Dalam Kriyantono (2014, p. 11) memaknai teori sebagai penjelasan yang logis dan empiris mengenai objek yang akan dikaji. Selain itu, konsep merupakan istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan objek atau fakta-fakta yang dihasilkan saat melakukan pengamatan (Kriyantono, 2014, p. 17). Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### **2.2.1 Media Sosial**

Menurut Mandiburgh dalam Nasrullah (2017) mendefinisikan media sosial sebagai medium yang memberikan tempat penggunanya untuk menghasilkan konten tertentu (*user-generated content*). Selain itu, media sosial dapat difungsikan sebagai suatu *platform* yang berfokus terhadap eksistensi penggunanya dan memfasilitasi aktifitasnya untuk berkolaborasi. Lalu, Van Dijk (2017) menilai medium ini dapat memperkuat hubungan antarpenggunanya dalam sebuah ikatan sosial (Nasrullah, 2017, p.11). Oleh karena itu, media sosial memungkinkan antarpengguna untuk merpresentasikan dirinya dalam berinteraksi, berkomunikasi, berbagi, bekerja sama, serta membuat ikatan sosial secara virtual.

Media sosial menjadi salah satu *platform* yang hadir dalam media siber sehingga karakteristik yang dimiliki, tidak berbeda jauh dengan media siber. Walaupun demikian, media sosial tetap memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh berbagai jenis media siber yang lain. Media sosial juga memiliki batasan dan ciri tertentu yang dimiliki media lainnya. Contohnya, karena media sosial terbentuk dari pemahaman bagaimana media ini diaplikasikan sebagai sarana bersosialisasi secara virtual (Nasrullah, 2017, p.15).

Berikut karakteristik yang dimiliki media sosial (Nasrullah, 2017, p.16), antara lain:

1. Jaringan (*Network*)
2. Informasi (*Information*)
3. Arsip (*Archive*)
4. Interaksi (*Interactivity*)
5. Simulasi Sosial (*Simulation of society*)
6. Konten oleh pengguna (*User-generated content*)

Dalam politik, karakter media sosial dapat berfungsi untuk melibatkan diri dalam keputusan kolektif yang meliputi aspek-aspek kehidupan dari anggota masyarakat dalam sistem sosial tertentu (Nasrullah, 2017, p.17). Kontrol ini dalam pemerintahan, juga birokrasi, parlemen, militer, partai politik, hingga grup yang terbuat dalam masyarakat.

Perangkat yang menyediakan media sosial seakan memberikan wadah kepada penggunanya yang juga sebagai warga negara untuk berperan saat penyampaian aspirasi dari apa yang menjadi perhatian mereka. Nasrullah (2017, p. 128)

menyampaikan umumnya digunakan sebagai medium penyampai aspirasi walaupun tetap saja kesempatan untuk terpublikasi di suatu media memiliki ketentuan. Saat ini berbagai instansi media massa juga turut memanfaatkan media sosial. Masih ada mekanisme kerja dan kebijakan tertentu.

Media sosial dengan nilai-nilai baru yang tak hanya difungsikan untuk menceritakan diri (*self disclosure*), namun juga untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap pembentukan regulasi. Nasrullah (2017, p. 128) memaparkan bahwa penyampaian ini dapat berupa aksi-aksi yang secara virtual pada kasus-kasus hukum tertentu. Contoh nyatanya seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memanfaatkan fitur di media sosial untuk menyampaikan pengumuman penahanan koruptor yang baru tertangkap tangan hingga informasi terkait jumlah dana yang dikorupsi.

Kondisi lainnya yang menunjukkan kekuatan media sosial adalah karena dapat mengubah pola-pola tradisional ke ranah demokratisasi. Suara satu orang terhadap suatu isu jika disampaikan di media sosial dapat menjadi *viral* dengan cepat. Demokrasi dalam media sosial lainnya yaitu sebagai wadah para praktisi politik meraih simpati pendukungnya secara *online*.

#### **2.2.1.1 Media Sosial Youtube**

Youtube merupakan salah satu situs media sosial. Situs ini didirikan secara independen pada 14 Februari 2005 oleh Steve Chen, Chad, Hurley, dan Jawed Karim. Ketiganya adalah mantan karyawan PayPal. Saat ini, Youtube dimiliki oleh Google sejak Oktober 2006. Dalam artikel Tirto.id,

Youtube menjadi pelopor media sosial yang berbasis video (Tirto.id, 2019, para. 12).

Youtube berkembang dengan cepat di dunia maya. Menurut data Statista dalam Tirto.id, saat ini terdapat 1,9 miliar pengguna aktif Youtube. (Tirto.id, 2019, para. 13). Selain itu, berdasarkan situs Alexa, Youtube merupakan media sosial yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet.

Tiga pendiri Youtube menyampaikan, tercetusnya ide untuk membuat Youtube karena kesulitan untuk mengunggah video dan membagikannya melalui internet. Oleh karena itu, diciptakan *killer app* yang memudahkan untuk berbagi video. *Killer app* merupakan istilah bagi aplikasi yang sangat berguna (Tirto.id, 2019, para. 14). Sebelum hadirnya Youtube, terdapat beberapa *killer app*, seperti LiveJournal, Hot or Not, Wikipedia, Friendster, dan Flickr dengan keunggulan masing-masing yang berbeda (Tirto.id, 2019, para. 15).

Youtube mengadopsi ide-ide dari beberapa aplikasi itu dan menerapkannya sehingga memiliki keunggulan-keunggulan dibanding media sosial lainnya. Contohnya, gagasan mengenai *user-generated content* diambil dari LiveJournal. Lalu, ide tentang menyatukan tema yang serupa terkait konten yang diunggah berasal dari Flickr. Kemudian, dari Wikipedia terdapat ide yang membuat para penggunanya dapat membangun komunitas tanpa mengeluarkan biaya.

Dalam media sosial ini, terdapat beberapa fitur seperti *related video* yang memungkinkan penggunanya melihat video berkaitan dengan tema video yang sedang ditonton; *user interaction and easy sharing* merupakan fitur yang membuat penggunanya saling berinteraksi melalui kolom komentar dan membagikan video ke *platform* lainnya dengan mudah. Fitur selanjutnya adalah *external platform* yang memudahkan *user* untuk menempelkan (*embed*) video yang diinginkan ke situs web pribadi.

YouTube menyampaikan dalam situsnya, bahwa misinya adalah memberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat serta menunjukkan sisi dunia kepada setiap orang. Nilai kebebasan ini terbagai menjadi empat, yaitu:

- A. Kebebasan berekspresi;
- B. Kebebasan memperoleh informasi;
- C. Kebebasan menggunakan peluang yang ada; dan
- D. Kebebasan untuk memiliki tempat berkarya.

Dalam situsnya, terdapat berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengguna dan video yang diunggah, seperti hak cipta, konten yang diperbolehkan, konten yang dinilai melanggar, dan batasan umur penonton video.

### 2.2.2 Demokrasi Deliberatif

Munculnya gagasan bahwa pemerintah yang sah harus mewujudkan “kehendak rakyat” memiliki sejarah yang panjang dan terdapat dalam berbagai varian. Konsep demokrasi deliberatif telah hadir dalam dua dekade terakhir yang

merupakan perkembangan yang menarik dalam teori politik. Dalam buku yang berjudul *Deliberative Democracy Essays on Reason and Politics* mendefinisikan demokrasi deliberatif sebagai gagasan bahwa masalah pembuatan undang-undang yang sah merupakan musyawarah warga negara. Hal ini membangkitkan impian perundang-undangan yang rasional (Bohman, 1997, p. 10). Secara singkat menyajikan sistem otonomi politik yang ideal berdasarkan alasan praktis warga negara.

Hardiman menyampaikan, teori demokrasi deliberatif tidak selalu terpusat dalam penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus atau boleh dilakukan oleh warga negara, tetapi berkaitan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan tersebut (2009, p. 128). Lalu, legitimasi membutuhkan partisipasi atau lebih daripada itu, seperti adanya keterlibatan diskursif publik. Pasalnya, tidak ada legitimasi tanpa adanya partisipasi dan tidak ada kepatuhan tanpa hadirnya legitimasi. Publik mampu terlibat untuk menyatakan apa yang patut dalam lingkup kerangka kepentingan bersama. Oleh karena itu, Hardiman menyatakan proses politik demokrasi tidak pernah berlangsung dalam ruang yang terisolasi (2009, p. 60).

Adanya perdebatan dan penalaran publik menjadi intisari dalam demokrasi deliberatif. Aksi ini dinilai penting karena melalui tahap perdebatan dan penalaran ditetapkannya suatu keputusan, artinya, harus ada alasan-alasan yang rasional dibalik keputusan. Sisi lainnya, hal ini membuka keterlibatan masyarakat dalam ruang publik atas keputusan yang dipilih sehingga lancarnya arus komunikasi didasari agar publik teredukasi (*well-informed*) (Susanto, 2010, p. 61).

Deliberasi yang berkualitas tinggi juga tidak berani melampaui nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum ketika mempertimbangkan dalam suatu kasus. Beberapa masyarakat mungkin berpikir bahwa nilai-nilai memiliki pengaruh sama sekali untuk mencapai pertimbangan terbaik, dengan juri hanya menerapkan fakta-fakta pada kasus dan mengambil hukum sebagaimana yang diberikan. Seperti satu keadilan biasanya menginstruksikan partisipan, mereka harus menerapkan fakta-fakta yang ada.

Demokrasi deliberatif tidak dapat terlepas dari konsep yang didasarkan pada fakta. Tabel 2.1 memaparkan bahwa partisipan harus mempertimbangkan undang-undang yang berlaku serta tetap melihat unsur keadilan sebagai nilai kunci dalam menilai suatu kasus.





**Tabel 2.1 Key Features of Deliberation**

No	Analytic process	
1	<i>Create a solid information base</i>	<i>Consider all of the facts and testimony provided during the trial.</i>
2	<i>Prioritize the key values at stake</i>	<i>The paramount values are ensuring justice and the rule of law.</i>
3	<i>Identify a broad range of solutions</i>	<i>Brainstorms a wide variety of ways to address the problem.</i>
4	<i>Weigh the pros, cons, and tradeoffs among solutions</i>	<i>Consider whether each possible verdict or sentence upholds the relevant laws identified by the judge and serves the larger cause of justice.</i>
5	<i>Make the best decision possible</i>	<i>Update participants opinion in light of what you have learned.No joint decision need to be reached.</i>
	<i>Social process</i>	
1	<i>Adequately distribute speaking opportunities</i>	<i>The foreperson and others should ensure a balanced discussion by drawing out quiet participants and welcoming dissenting participants to speak up.</i>
2	<i>Ensure mutual comprehension</i>	<i>Speak plainly to each other, and ask for clarification when confused. Ensure understanding of technical evidence or finer points of law.</i>
3	<i>Consider other ideas and experiences</i>	<i>Listen carefully to what others say, especially when you disagree with their view of the case. Try to understand their unique perspective on the case.</i>
4	<i>Respect other participants</i>	<i>Presume that each participants is honest and well-intentioned. Remember that cases go to trial because the parties involved see the case differently.</i>

Sumber: John Gastil, 2010, p. 92

Singkatnya, unsur yang terdapat pada tabel 2.1 *Key Features of Deliberation* dimaknai bahwa terdapat dua proses atas deliberasi, yaitu proses analitis dan proses sosial. Dalam proses analitis, terdapat unsur terbentuknya informasi yang solid. Oleh karena itu, selama proses deliberasi, fakta yang berupa kesaksian yang muncul maka harus dipertimbangkan. Berdasarkan unsur di atas, maka penelitian ini membentuk unit analisis narasi untuk melihat informasi yang solid dari isi konten yang diteliti dan unit analisis fakta yang terdapat dalam konten penelitian.

Selanjutnya, dalam unsur kedua terdapat pertimbangan untuk memprioritaskan nilai-nilai utama yang muncul dari berbagai sumber. Nilai-nilai ini menggambarkan adanya keadilan dan supremasi hukum yang ada. Berdasarkan unsur itu, maka terbentuk unit analisis yang dikembangkan menjadi dua, yaitu unit analisis sumber yang merupakan unit untuk melihat adanya pertimbangan dari sumber-sumber yang ada dan disebutkan sehingga menambah sudut pandang dalam melihat suatu isu. Lalu, unit analisis nilai-nilai yang dibentuk untuk meneliti nilai yang dimunculkan dan mewujudkan keadilan dalam proses demokrasi.

Dalam proses analitis terdapat unsur yang menyebutkan cara untuk mengatasi masalah. Selain itu, pro dan kontra yang muncul atas pertimbangan hukuman atau vonis yang mungkin diberlakukan dengan tujuan penegakkan hukum yang relevan. Unsur ini dikembangkan menjadi unit analisis alasan yang memaparkan alasan dari pendapat khalayak deliberasi atas isu yang sedang dibahas. Alasan khalayak menyangkal, menyetujui, atau melawan pernyataan tertentu. Berdasarkan pernyataan itu, khalayak dapat mengidentifikasi berbagai

solusi yang muncul dalam proses deliberasi sehingga terbentuk unit analisis alasan. Setelah melihat pemaparan dalam proses analitis, maka terbentuk enam unit analisis, yaitu narasi, fakta, sumber, nilai-nilai, alasan, dan solusi.

Berdasarkan proses sosial yang ada dalam tabel 2.1, terdapat empat unsur. Keempat unsur itu meliputi cara khalayak deliberasi untuk memberikan peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan tanggapan. Contohnya, dengan peluang meminta klarifikasi saat merasa kurang memahami dan yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan atas pernyataannya. Selain itu juga menghargai pendapat atau pengalaman yang disampaikan oleh khalayak yang memiliki pernyataan yang tidak sama. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan untuk menggabungkan keempat unsur dalam satu unit analisis, yaitu responsivitas.

Gutmann dan Thompson dalam (Reich, 2011, p. 93-95) menyatakan terdapat empat karakteristik dalam demokrasi deliberatif. Pertama, tersedianya ruang publik (*public sphere*) dalam berbagai bentuk agar publik dapat ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, karakteristik yang berkaitan dengan jalan atau aksesibilitas bagi semua warga negara. Karakteristik yang ketiga dituliskan bahwa proses bertujuan untuk menghasilkan adanya keputusan yang mengikat dalam periode waktu tertentu. Terakhir, karakteristik yang berkaitan dengan proses demokrasi deliberatif harus dinamis dan keputusannya berdasar dengan dialog yang dilakukan.

Menurut Habermas dalam (Hardiman, 2009, p. 128) terdapat empat kondisi yang sesuai untuk tercapainya proses deliberasi yang ideal, antara lain:

- a. Setiap individu harus mampu menyampaikan ide mereka secara terbuka dan juga mampu memberikan kritik atas ide-ide lainnya;
- b. Konsep mengenai kuasa yang diasosiasikan dengan status sosial, harus dihapus;
- c. Argumentasi yang berdasarkan dengan suatu tradisi atau dogma harus dimunculkan;
- d. Sebuah kebenaran harus dimunculkan dari konsensus.

Selain itu, menurut Jurgen Habermas dalam (Hardiman, 2009, p. 126) model diskusi publik yang ideal dan kehidupan demokrasi yang kuat dikonseptualisasikan sebagai situasi yang ideal apabila terdapat dua orang atau lebih mempertanyakan pandangan seseorang mengenai dunia (isu) hingga perspektif yang muncul menemukan satu dasar yang sama untuk mencapai suatu keputusan.

Berdasarkan penjelasan di atas, percakapan politik deliberatif adalah proses penyelesaian masalah yang inklusif yang memberikan peluang bagi warga negara untuk mencapai penilaian yang berarti tentang masalah publik. Proses ini ditandai oleh keterbukaan terhadap konflik, tidak adanya dominasi, penggunaan argumen yang jelas dan logis, dan saling pengertian. Meskipun satu percakapan jarang menyelesaikan perselisihan politik, dari waktu ke waktu percakapan politik yang disengaja dapat berkontribusi pada proses demokrasi dengan meningkatkan kecanggihan penilaian publik, yang pada akhirnya diharapkan dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui ruang publik yang tersedia, contohnya media sosial.

### 2.3 ALUR PENELITIAN

Dalam penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah memilih media sosial Youtube.com sebagai pokok penelitian. Selanjutnya, peneliti memilih Akun Najwa Shihab yang merupakan seorang jurnalis dan aktif mengunggah video melalui akunnya. Kemudian, peneliti melihat video-video yang diunggah Najwa Shihab dalam *playlist* Mata Najwa dan memilih video "Siapa Mau Pilih Koruptor" Part 1. Lalu, komentar-komentar dalam video itu dikumpulkan dan dibaca berdasarkan *filter top comment*.

Keseluruhan komentar itu merupakan populasi penelitian. Lalu, peneliti memilih komentar sesuai jumlah sampel dan mengamati apakah menggambarkan demokrasi deliberatif atau tidak. Jika menggambarkan demokrasi deliberatif, maka peneliti mengaplikasikan konsep yang dikemukakan oleh John Gastil dalam kolom komentar itu.



**Tabel 2.2** Alur Penelitian

